



**RANCANGAN AKHIR**

**RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2023**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pematangsiantar yang diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Renja OPD. Rancangan Renja OPD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penetapan Program prioritas yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 berorientasi pada isu prioritas pembangunan Kota Pematang Siantar sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika serta mempertimbangkan pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2024

#### **1.1 Latar Belakang**

Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 serta Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan tahun 2024. Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan adalah sangat diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi dan informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan databased sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif. Tiga (3) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni; pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam rangka perwujudan Good Governance sesuai tuntutan reformasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik berkewajiban menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Rancangan Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun beberapa hal yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar di Tahun 2024 ini, melalui keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota pematangsiantar, diantaranya meningkatkan eksistensi



dari urusan kewenangan Komunikasi dan Informatika, urusan kewenangan Statistik, serta urusan kewenangan Persandian. Diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar dapat menjadi suatu lembaga yang dapat diandalkan dalam penyediaan informasi yang berkualitas, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal melalui optimalisasi pelayanan berbasis multimedia (media cetak, media online dan media elektronik).

Proses penyusunan Rancangan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Rancangan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2024 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
  14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kota Pematangsiantar.



15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022.
16. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2024 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 1 tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 01 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, penetapan program prioritas yang berorientasi pada isu prioritas pembangunan Kota Pematang Siantar sesuai dengan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar adalah :

1. Menyediakan acuan resmi untuk menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD secara terpadu dan terukur.
2. Menjadikan landasan operasional bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar.
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

	2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Tahun Lalu

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Triwulan 1 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### 1. Penetapan Indikator Kinerja

Merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), Keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### 2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

#### **a. Realisasi Proram/Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil Keluaran yang direncanakan.**

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota pematang Siantar dengan APBD Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.7.672.233.276.- yang terdiri dari 4 Program dan 8 Kegiatan dan 19 sub kegiatan . Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp.6.902.963.696.- Dengan capaian kinerja keuangan sebesar 89,97 %

Sejalan dengan prioritas pembangunan Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar, maka



prioritas anggaran diarahkan untuk mendukung urusan pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penyusunan anggaran Tahun 2022, berpedoman pada kesesuaian antara renja dengan RKA, pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU).

Adapun Evaluasi terhadap kegiatan antara lain:

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar telah dapat melaksanakan tugas utamanya yang menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah dan yang tidak memenuhi target Kinerja antara lain :

1. Jumlah konten/informasi tentang kebijakan Pemerintah Kota dan program pemerintah yang dapat diakses publik melalui media website Pemerintah Kota Pematang siantar sebanyak 463 informasi/konten dengan jumlah berita sebanyak 462 dan informasi berupa galeri sebanyak 1.
2. Kota Pematang Siantar telah menerima hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 dengan nilai **2,35** atau predikat "**Cukup**", nilai ini mengalami peningkatan sebesar **0,82** poin dari hasil evaluasi SPBE Kota Pematang Siantar tahun 2021 yaitu sebesar **1,53** atau predikat "**Kurang**"

**b. Realisasi Program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan.**

1. Persentase Penanganan Aduan SP4N Lapor Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 95,3% , dimana keluhan atau aduan yang masuk melalui aplikasi sebanyak 43 Laporan/ aduan, laporan terdisposisi yang belum ditindak lanjuti 2 aduan/laporan, laporan terdisposisi sedang diproses 14 aduan/laporan, laporan terdisposisi selesai sebanyak 27 aduan/laporan.
2. Nilai AKIP Kota Pematang Siantar sesuai hasil evaluasi Kementrian PAN dan RB yang terakhir, disebutkan tingkat efektifitas dan efisiensi Pengguna Anggaran masih rendah, jika dibandingkan dengan capaian kinerja, hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintah berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Pematang Siantar, masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih Lanjut. Pada Tahun 2022 Kota Pematang Siantar mendapat Prediket



CC dimana tahun sebelumnya Kota Pematang Siantar mendapat Prediket C, nilai CC dengan nilai absolut lebih besar 50-60 (cukup memadai) dengan gambaran bahwa AKIP cukup Baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar.

3. Jumlah metadata yang disajikan dalam bentuk buku statistik sektoral adalah 8 metadata

**c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

4. Persentase Penanganan Aduan SP4N Lapor Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 95,3%, dimana keluhan atau aduan yang masuk melalui aplikasi sebanyak 43 Laporan/ aduan, laporan terdisposisi yang belum ditindak lanjuti 2 aduan/laporan, laporan terdisposisi sedang diproses 14 aduan/laporan, laporan terdisposisi selesai sebanyak 27 aduan/laporan.
5. Nilai AKIP Kota Pematang Siantar sesuai hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB yang terakhir, disebutkan tingkat efektifitas dan efisiensi Pengguna Anggaran masih rendah, jika dibandingkan dengan capaian kinerja, hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintah berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Pematang Siantar, masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih Lanjut. Pada Tahun 2022 Kota Pematang Siantar mendapat Prediket CC dimana tahun sebelumnya Kota Pematang Siantar mendapat Prediket C, nilai CC dengan nilai absolut lebih besar 50-60 (cukup memadai) dengan gambaran bahwa AKIP cukup Baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar.

**d. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan**

Dalam rangka meningkatkan nilai SPBE Kota Pematang Siantar, Tim Koordinasi SPBE Kota Pematang Siantar bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar telah melakukan percepatan selama tahun 2022, diantara sebagai berikut :

1. Penyusunan Peraturan Wali Kota pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik antara lain Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pematang Siantar, Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kota Pematang Siantar, Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kota Pematang Siantar, dan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kota Pematang Siantar;
2. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bersifat teknis antara lain SOP Pembangunan Aplikasi, SOP Permintaan Sub Domain, SOP Deployment Aplikasi, SOP Manajemen Bandwith, SOP Penyediaan Bandwith, dan SOP Permohonan Jaringan Baru; dan
3. Rapat Koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar yang Aplikasi Layanannya digunakan menjadi indikator penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengumpulan Data Dukung Aplikasi Layanan terkait.  
Adapun Hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai SPBE Kota Pematang Siantar lebih lanjut adalah sebagai berikut :
  - a. Pembuatan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pematang Siantar;
  - b. Penerapan Sistem Manajemen Risiko SPBE di Kota Pematang Siantar;
  - c. Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kota Pematang Siantar;
  - d. Penerapan Sistem Manajemen Pengetahuan SPBE di Kota Pematang Siantar;
  - e. Penerapan Sistem Manajemen Perubahan SPBE di Kota Pematang Siantar;



- f. Penyusunan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar tentang Audit TIK Kota Pematang Siantar;
  - g. Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE Kota Pematang Siantar;
  - h. Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE Kota Pematang Siantar; dan
  - i. Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE Kota Pematang Siantar;
4. Internet telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi perorangan, organisasi, perusahaan, dan instansi pemerintahan, internet digunakan untuk membuat system informasi yang bermanfaat mempermudah tugas-tugas pemerintahan. Manfaat Jaringan Infrastruktur Internet Bagi Pemerintah antara lain : sebagai media yang sangat efektif untuk digunakan dalam menyampaikan informasi resmi yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai penyampai aspirasi masyarakat melalui aplikasi pengaduan lainnya, sebagai mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan public. Persentase OPD yang menggunakan internet yang disediakan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar sebesar 100 % yang artinya 33 OPD sudah menggunakan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar.
5. Layanan Publik yang ada dikota Pematang siantar antara lain :
- SMART BPHTP Pengelola Badan Pengelola Keuangan Daerah
  - SMART PBB Pengelola Badan pengelola Keuangan Daerah.
  - Konfirmasi Status Wajib Pajak Pengelola Badan Pengelola Keuangan Daerah
  - SIMPADU Pengelola Dinas Penanaman Modal PTSP
  - Dukcapil Online Pengelola Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- dan kelima aplikasi tersebut diatas sudah terintegrasi pada portal Website Pemerintah Kota Pematang Siantar.

**e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, urusan statistik dan urusan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian permasalahan pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kota Pematang Siantar. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota

Pematang Siantar yang telah ditetapkan, maka misi Pembangunan Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 adalah : Misi pertama adalah menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom, misi kedua adalah menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemic dan atau pasca pandemic Covid-19, Misi ke tiga adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperative governance, misi ke empat adalah menguatkan sentralisasi dan daya tarik kota, guna pencapaian siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional diprovinsi sumatera utara, sedangkan misi kelima adalah mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Berdasarkan misi diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah bidang Urusan komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian dalam menjalankan Tugas dan fungsinya mendukung Misi ke Tiga yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperative governance. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat daerah ialah bahwa tidak akan tercapainya Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.



**f. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab.**

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

- 1) Melakukan perubahan target program dan kegiatan pada perjanjian kinerja.
- 2) Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
- 3) Merencanakan target fisik dan keuangan yang seimbang agar rencana kerja pencapaiannya maksimal.
- 4) Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah yang menjadi acuan dalam menganalisa kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja.

Tabel T-C-29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Pematang Siantar**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar**

1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	
					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Kinerja Program (n-2)						Target Program (n-1)	Realisasi Program (n-1)
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah: Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD) Tahun 20022-2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dari Keluaran/ Kegiatan/sub s/d dengan tahun (n-2)	Target Program (n-2)	Realisasi Program (n-2)	Target Realisasi (n-2)	Target program dan kegiatan/Sub Kegiatan (Rencana PD tahun n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Target Realisasi Capaian Daerah s/d tahun berjalan	Target Realisasi (n-1)	
1	Program Peningkat Urusan Pemerintahan daerah	Capaian ASIF Peningkat daerah	100.477.555	-	-	-	0=77/0	-	10=5+7+0	11=10/4		
	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Kebijakan Daerah	jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	20.977.555	-	-	-	-	-	-	-		
	Pengurusan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Evaluasi Revisi LAKIP/LKIP/LKPU	22.500.000	-	-	-	-	-	-	-		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penertamaan Gaji dan Tunjangan Aparatur PNS yang dibayarkan	17.069.550.000	-	-	-	-	3.411.223.652	479.366.007	2,79		
	Pengadaan dan pemertanian Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-		





	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang disediakan	110.000,000	-	-	-	-	-	22.482,000	6.778,306	6,16
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	290.000,000	-	-	-	-	-	77.700,000	6.387.875	2,20
	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	130.000,000	-	-	-	-	-	46.596.820	11.050.050	8,50
	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen buku/bahan dan peraturan perundang-undangan	500.000,000	-	-	-	-	-	101.598,000	0	0
	Fasilitas Kunjungan Temu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Temu	40.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850.000,000	-	-	-	-	-	291.119,000	53.205.600	6,26
	Penyusunan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Asip Dinamis pada SKPD	150.000,000	-	-	-	-	-	25.200,000	0	0
	Penyediaan Barang Meja Kerja yang dibutuhkan secara	Jumlah Paket barang penyediaan barang yang disediakan	2.815.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	800.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Ispengon	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Ispengon yang disediakan	85.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	350.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Perawatan dan mesin lainnya	Jumlah unit perawatan dan mesin lainnya	850.000,000	-	-	-	-	-	95.286,000	58.830,000	2,24
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	380.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	150.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-



	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																		
	Perbaikan atau Pemeliharaan Dapur		2.535.000,000																	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	380.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan jasa Perawatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	100.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.430.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembelian dan Perawatan Mesin, Kendaraan Bermotor, Peralengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian dan Perawatan Mesin, Kendaraan Bermotor, Peralengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.970.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekerjakan dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	175.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekerjakan dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	500.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembelian Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Dipekerjakan yang Dipekerjakan	420.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembelian Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara	625.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembelian/ Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	400.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/ Dirahibiskan	600.000.000																	
	Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau - Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi																		
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
	Program Pengeloaan Informasi dan Komunitas Publik	Pertemuan Konten Informasi berbasis program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi	4.085.942.418																	
	Pengelolaan informasi komunikasi publik	Jumlah Informasi Publik	4.885.942.418																	
	Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah dokumen hasil monitoring/opini dan aspirasi publik	745.823.312																	
	Pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunitas Publik	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan perencanaan Media Komunitas Publik	1.250.000.000																	
	Pengelolaan Media Komunitas Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunitas Publik	1.330.000.000																	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen Pelayanan Informasi Publik	1.150.000.000																	
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	30.000.000																	
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	24.211.543																	
	Manajemen Komunitas kritis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunitas kritis	30.000.000																	
	Pengembangan hubungan masyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media	30.000.000																	



	media, komunikasi komunitas	dan Komunitas dalam Mendalamkan Informasi Program atau kegiatan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan perangkat saran dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang terintegrasi pada website portal Pemerintah Kota Palembang/Sektor	173.727.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Tim Dewan yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sub-Domina di seluruh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	jumlah Dewan yang dibentuk oleh pemerintah prov		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah kabupaten/kota	87.727.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendaftaran dan Pengurusan Nama Domain dan Sub Domain dalam Pelayanan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengurusan Nama Domain dan Sub Domain dalam Pelayanan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	86.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan & Upgrade Pemerintah daerah kabupaten/kota	persentase 100 yang seharusnya dengan akses internet yang di sediakan oleh Dinas komunikasi dan informatica kota/pemeritah Sektor	24.142.419.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendaftaran dari pengurusan E- Government dalam pelayanan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran dan Pengurusan E-Government dalam Pelayanan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	464.419.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Senkronisasi pengolahan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengolahan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	104.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Pusat data Pemerintah daerah	Jumlah pusat data yang dikelola	14.101.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intera Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intera Pemerintah Daerah	4.640.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	489.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Pesanggrat Daerah yang Memerlukan	281.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Ditambangkan	2.380.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dikomunikasikan Sesuai dengan Menterpan Smart City	405.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	405.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Government Chief Information Officer	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief	405.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan	673.987.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,63





	Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota a=																	
	Pelaksanaan Kesuksesan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kesuksesan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Layanan Keumuhan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keumuhan Informasi	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota pematang Siantar melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Pencapaian kinerja ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kota Pematang Siantar.

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah masing-masing.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah daerah untuk menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga dapat tercapainya GOOD GOVERNANCE.

Kondisi pemerintah yang baik akan menjadikan pemerintahan yang baik pula sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan berkualitas. Pemerintah Daerah beserta perangkat-perangkatnya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya harus diukur kinerjanya berdasarkan aspek keuangan dan aspek non keuangan.

Salah satu perangkat daerah dimaksud adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar yang bertugas membantu kepala daerah yang mempunyai 3 bidang dan 1 sekretariat, yang mempunyai tugas yang berbeda beda dan kinerjanya harus diperhatikan juga. Pengukuran Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan suatu OPD. Manfaat Pengukuran Kinerja memotivasi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari upaya memberi kepuasan kepada masyarakat. Salah satu penunjang Pengukuran Kinerja adalah Sarana Prasarana yang ada untuk digunakan dalam mempermudah dan memperlancar pegawai dalam bekerja. Adapun Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

### **1. Analisis Keuangan**

Hasil Pengukuran Kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari



suatu sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antar berbagai program, dengan demikian keberhasilan pembangunan tidak dapat diakui sebagai hasil dari sumber dana atau oleh satu pihak saja. Akumulasi Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2022 untuk Total Belanja 89,97 % apabila capaian kinerja tersebut dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal adalah berhasil

## 2. Analisis Pelayanan

Layanan belum terintegrasi. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keterbatasan sumber dana serta Persandian dan Statistik yang belum optimal sehingga pelayanan belum optimal, dan belum terintegrasinya aplikasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan belum memenuhinya regulasi regulasi untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

## 3. Analisis Sarana dan Prasarana

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan sarana dan prasarana belum memadai diakibatkan jaringan infrastruktur online terintegrasi belum sampai ke puskesmas-puskesmas (saat ini hanya di OPD, kecamatan dan kelurahan ) diakibatkan keterbatasan dana.

Tabel.T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar

(1)	Indikator	BPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun n	Tahun (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>Indeks SPBE</b>			0	2,8	2,9	3,1	0	2,6	2,9	3,1	
	<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>			n/a	n/a	3	4	n/a	n/a	3	4	
	<b>Indeks Keterbukaan Informasi Publik</b>			n/a	Menuju informatif	informatif	informatif	n/a	Menuju informatif	informatif	informatif	
	Persentase Penanganan keluhan/aduan warga melalui Aplikasi SP4N Lapor			0	70 %	90 %	90%		95,3	90	90	
	Indeks Kepuasan Masyarakat			0	80	80	80	0	0	50	50	
	Capaian AKIP Perangkat Daerah			0	CC	B	B	C	CC	B	B	
	<b>Jumlah</b>			0	550	2000	4000	0	463	8800	9000	

Informasi/konten terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi											
Persentase layanan publik yang terintegrasi pada website portal Pemerintah Kota Pematang Siantar			0	80 %	85 %	90 %	0	100 %	100 %	100%	
		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar	0	100 %	100%	100%	0	100 %	100%	100%	
Jumlah Metadata yang disajikan			8	10	12	14	0	8	12	14	
		Tingkat Keamanan Informasi	0	100 %	100%	100%	0	0	100%	100%	

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Perumusan Permasalahan Pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan Perangkat Daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah dimasa datang. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan Pembangunan dapat juga dimaknai sebagai penyebab terjadinya kesenjangan tersebut. Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan diklasifikasikan menjadi masalah utama, masalah Pokok masalah dan akar masalahnya.

Berikut dirumuskan yang menjadi permasalahan Pokok Perangkat daerah yang diprioritaskan :

#### Rumusan Permasalahan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggaraan pemerintah belum Optimal	Pemerintahan Yang berbasis elektronik belum berjalan sepenuhnya Pelayanan Pengaduan smart city belum optimal

Demi mewujudkan Kota Pematangsiantar menjadi kota Sehat Sejahtera dan Berkualitas sebagaimana tertera pada visi dan misi Kota Pematangsiantar. Dalam Visi tersebut memuat pokok visi yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun kedepan. Penjabaran pokok-pokok visi yang sesuai dengan bidang Urusan komunikasi dan informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik sebagai berikut :

#### Penjelasan Visi RPJMD

VISI	Pokok VISI	Penjelasan VISI
Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas	Berkualitas	Meningkatkan Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju dan Unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan Pengelolaan Sumber daya alam yang ada, Melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsife serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai sub pusat perdagangan regional sumatera utara hinterland

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, yang menjadi misi kepala daerah yang masih bersifat sementara dan masih dapat disempurnakan, dimana proses penyelesaian RPJMD paling lama adalah 6 bulan sejak pelantikan kepala Daerah terpilih, yang sesuai dengan misi perangkat daerah adalah sebagai berikut :



### Penjelasan Misi RPJMD

MISI	PENJELASAN MISI
Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip Good governance dan cooperative governance	Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang professional.

Dalam rangka mendapatkan kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan diperlukan keselarasan dan konsistensi, keselarasan hubungan antara visi, misi sebagai berikut

#### Keselarasan RPJPD dan RPJMD Kota Pematangsiantar

RPJPD Kota Pematangsiantar 2005-2025		RPJMD Kota Pematangsiantar 2021-2026
<b>VISI</b>		
Mewujudkan kota Pematangsiantar sebagai Pusat Perdagangan dan jasa, yang mantap, maju dan jaya, dengan dukungan sektor Pendidikan, kesehatan, Infrastruktur dan Pariwisata		Terwujudnya Kota Pematangsiantar sehat sejahtera dan Berkualitas
<b>MISI</b>		
<b>Misi 1</b> Mengembangkan Pelaksanaan Tata pemerintahan yang baik (Good Governance)		<b>MISI 3</b> Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperative governance

Keselarasan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJMD Kota  
Pematangsiantar

PERUBAHAN RPJMD SUMATERA UTARA 2019-2023		RPJMD Kota Pematangsiantar 2021-2026
VISI		
Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat		Terwujudnya Kota Pematangsiantar sehat sejahtera dan Berkualitas
MISI		
Misi 2 Bermartabat dalam politik : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki		MISI 3 Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperative governance

yang menjadi isu-isu strategis Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian dan Statistik adalah sebagai berikut :

- ✓ Penguatan data center yang menjadi pusat data pemerintah kota
- ✓ Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo.
- ✓ Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.
- ✓ Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota.
- ✓ Peraturan Daerah atau Kepala Daerah terkait implementasi E government
- ✓ Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi dan kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo
- ✓ Informasi tentang Sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
- ✓ Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah

- ✓ Sistem Informasi manajemen Pemerintah Kota
- ✓ Pembentukan Regulasi regulasi dalam mendukung Penyelenggraan SPBE
- ✓ Indeks Penyelenggraan SPBE
- ✓ Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah.
- ✓ Persentase OPD Yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
- ✓ Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

## 1. Globalisasi

Globalisasi adalah suatu fenomena dalam peradaban manusia yang bergerak secara terus menerus. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Pesatnya pembangunan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilihat dari berbagai fasilitas di setiap rumah dan kantor dilengkapi dengan telepon, mesin fax, televisi kabel dan internet.

Dimasa-masa pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informatika saat ini muncul isu-isu politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Salah satu isu yang terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informatika adalah isu ekonomi yang tidak kalah penting dimana perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat bertransaksi. Hal ini terkait dengan semakin maraknya e-commerce yang berkaitan dengan adanya financial teknologi (findtech), e-banking, e-mail dan fasilitas yang memegang perekonomian lainnya.

Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan agar dapat mengoptimalkan pelayanannya sehingga daerah dapat berkembang secara optimal.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan Good Governance dan pembangunan dapat



berlangsung secara berdayaguna dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

#### **a. Tantangan dan Peluang**

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan bidang Komunikasi dan Informatika, maka diperlukan faktor pendukung, yang merupakan kekuatan, ancaman, peluang dan kelemahan baik faktor pendukung internal maupun eksternal.

Faktor Internal dan eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Kekuatan**

- Dukungan Pemerintah Kota Pematangsiantar dibidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian dan Statistik melalui Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar dan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 4 tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
- Sebagai Lembaga teknis daerah yang melakukan koordinasi pengembangan dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dapat bertindak sebagai pemberi pertimbangan teknis bagi OPD serta sebagai konsultan perencanaan pengembangan sistem informasi. Pada saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun jaringan internet semua OPD dan kecamatan.
- Tersedianya sistem aplikasi online dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi.
- Tersedianya command center yang merupakan bagian pengembangan pelaksanaan e-government.
- Ketersedian dana untuk membiayai kegiatan dalam menjalankan tupoksinya.
- Tersedianya sarana prasarana dalam menunjang perencanaan dan pengembangan.

##### **b. Kelemahan**

- Masih kurang dipahaminya tupoksi oleh sebagian Aparatur Sipil Negara, mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar baru dibentuk.
- Keterbatasan SDM (Kuantitas maupun kualitas)

- Belum adanya regulasi terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Belum adanya keamanan informasi pemerintah daerah
- Belum adanya OPD yang menggunakan statistic dalam memyusun perencanaan daerah dan untuk evaluasi pembangunan daerah
- Belum optimalnya pengelolaan database, sehingga implementasi E-Government belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat dan tepat dan akurat.
- Kurangnya pendidikan dibidang komunikasi dan Informatika terhadap aparatur pemerintah.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Peluang

- Adanya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan peran yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya.
- Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan OPD diwajibkan menyusun Renstra dan Renja OPD.

### b. Tantangan

- Banyaknya peraturan baru berkaitan dengan proses dan produk perencanaan dan penganggaran.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar masih belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi dan keterpaduan pengembangan disemua komponen yang ada.
- Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.
- Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan Rancangan Awal dengan hasil analisis kebutuhan. Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Pematang Siantar adalah proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Review terhadap rancangan awal yang dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan tertuang dalam tabel. TC.31 dibawah ini;



Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kota Pematang Siantar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Peningkat Urusan Pemerintahan daerah	Kominfo	Capaian AKIP Perangkat daerah	B	5.855.000.000	Program Peningkat Urusan Pemerintahan daerah	Kominfo	Capaian ASLE Perangkat daerah	B 1 Inovasi 80	4.690.575.000	
	Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1 Dokumen	22.500.000	Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1 Dokumen	9.836.559	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kominfo	Jumlah Dokumen Rencana dan Renstra	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kominfo	Jumlah Dokumen Rencana dan Renstra	2 Dokumen	4.836.957	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kominfo	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kominfo	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator realisasi Kinerja SKPD	Kominfo	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Indikator realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Indikator realisasi	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator realisasi Kinerja SKPD	Kominfo	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Indikator realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Indikator realisasi	1 Laporan	7	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kominfo	Jumlah dokumen Evaluasi Renja, LAKIP, LPPD, LKPI	8 Laporan	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kominfo	Jumlah dokumen Evaluasi Renja, LAKIP, LPPD, LKPI	8 Laporan	7	
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kominfo	Capaian administrasi keuangan Perangkat daerah	1 Tahun	3.422.500.000	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kominfo	Capaian administrasi keuangan Perangkat daerah	1 Tahun	2.805.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kominfo	Jumlah Bulan Penyerahan Gaji dan Tunjangan Aparatur PNS yang dibayarkan	14 Bulan	3.400.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kominfo	Jumlah Bulan Penyerahan Gaji dan Tunjangan Aparatur PNS yang dibayarkan	14 Bulan	2.800.000.000	
	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.000.000	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	7	



												Center dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dermawang Siantar
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	105.000.000	Banyaknya kebutuhan untuk alat tulis kantor	Center dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dermawang Siantar	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kominfo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kominfo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	25.000.000	Banyaknya dibutuhkan alat atau instrumen untuk Camarand Center, data center, media center dan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dermawang Siantar	Center dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dermawang Siantar	
Penyediaan Logistik Kantor	Kominfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	50.000.000	Penyediaan Logistik Kantor	Kominfo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket	77.700.000	Banyaknya kebutuhan untuk rapat-rapat koordinasi untuk analisis OPD maupun lintas sektoral	Center dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dermawang Siantar	
Penyediaan Barang dan perlengkapan	Kominfo	Jumlah Paket Barang dan perlengkapan yang disediakan	4 paket	20.000.000	Penyediaan Barang dan perlengkapan	Kominfo	Jumlah Paket Barang dan perlengkapan yang disediakan	4 paket	70.000.000	Banyaknya kebutuhan untuk cetak dan pengoperasian	Center dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dermawang Siantar	
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan	Kominfo	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	1 Dokumen	100.000.000	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan	Kominfo	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	1 Dok	105.000.000	Kebutuhan untuk cetak dan pengoperasian	Center dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dermawang Siantar	





Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kominfo	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kominfo	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kominfo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	80.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kominfo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kominfo	Gabungan Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar	100 %	610.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kominfo	Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar	1 tahun	504.999.601
Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 lap	4.999.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	130.000.000
Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	4 lap	1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	500.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lap	40.000.000
Pembelian Rutin Barang Milik Daerah	Kominfo	Jumlah Pembelian Rutin Barang Milik Daerah	1 Tahun	510.000.000	Pembelian Rutin Barang Milik Daerah	Kominfo	Jumlah Pembelian Rutin Barang Milik Daerah	1 tahun	200.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan	Kominfo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan	11 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan	Kominfo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan	11 Unit	100.000.000













		Statistik Sektor				Statistik Sektoral			
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kominfo	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang	1 Dokumen	20.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kominfo	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang	1 dokumen	J
Peningkatan Kapasitas Kerelevanan Statistik	Kominfo	Jumlah Peningkatan Daerah yang Mendapat	33 orang	20.000.000	Peningkatan Kapasitas Kerelevanan Statistik	Kominfo	Jumlah Peningkatan Daerah yang Mendapat	33 orang	I
Penyenggaraan Organisasi Statistik Sektoral di	Kominfo	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dibagikan	1 dok	11.500.000	Penyenggaraan Organisasi Statistik Sektoral di	Kominfo	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dibagikan	1 dok	J
URUSAN PERSANDIAN		Indeks Kominfo			URUSAN PERSANDIAN	Kominfo	Indeks Kominfo		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kominfo	Tingkat Kesadaran Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	100 %	56.568.706	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kominfo	Tingkat Kesadaran Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	100 %	141.568.701
Penyenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kominfo	Tingkat Kesadaran Informasi Pemerintah	100 %	56.568.706	Penyenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kominfo	Tingkat Kesadaran Informasi Pemerintah	100 %	141.568.701
Pesetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kominfo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang	1 Dokumen	41.568.706	Pesetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kominfo	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang	1 dok	41.568.700
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kominfo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	5.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kominfo	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 lap	50.000.000
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kominfo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan	1 laporan	5.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kominfo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan	1 lap	50.000.000

	Non Elektronik			Non Elektronik					
Penyediaan Layanan Keasmatan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keasmatan Informasi	2 OPD	5.000.000	Penyediaan Layanan Keasmatan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keasmatan Informasi	2 OPD	J

#### 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Tidak asanya usulan program kegiatan dari masyarakat dan pemangku kepentingan atau pikir

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>NIHIL</i>					



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah dan kebijakan umum nasional bidang komunikasi dan informatika adalah :

1. Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika (telekomunikasi, media dan informatika).
2. Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas pelayanan prima.
3. Penciptaan sumber daya manusia yang unggul yang mampu menjadi tenaga ahli terampil untuk mengisi lapangan kerja dibidang komunikasi dan informatika.

Adapun prioritas pembangunan nasional bidang komunikasi dan informatika adalah :

- a. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika seperti sector penyiaran, sector aplikasi, sector telekomunikasi dan sector informasi public dengan memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sector. Mendorong terjadinya pemakaian bersama sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan infromatika dengan seperangkat kebijakan dan regulasi.
- b. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika melalui penguatan infrastruktur, layanan dan kandungan informasi, serta menjangkau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan kapabilitas masyarakat melalui pengembangan TIK berbasis local, peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan komunitas Informasi Masyarakat (KIM) secara aktif menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab, serta pembangunan desa informatif
- c. Program prioritas aplikasi informatika melalui pengembangan aplikasi telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan pemerintahan yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan public.

- d. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat, menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat.

Adapun tujuan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar adalah Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informasi yang sehat, efisien dan aman, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing, menciptakan ketersediaan informasi public yang sistematis, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

### 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| MISI 3    | : | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperative governance   |
| Tujuan 1  | : | 1. Optimalisasi Layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi atau Sistem Pemerintahan Yang berbasis Elektronik (SPBE)   |
| Sasaran   | : | 1. Terwujudnya Pemerintahan berdasarkan prinsip Good governance dan cooperative governance  |
| Strategi  | : | 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur<br>2. Membuat regulasi regulasi terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Yang berbasis elektronik.  |
| Kebijakan | : | 1. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan demokratis dalam pelayanan publik.  |
| MISI 3    | : | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperative governance Menata sistem pelayanan public yang lebih baik dan professional |
| Tujuan 2  | : | Masyarakat memahami dan mengetahui kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.  |
| Sasaran   | : | Terwujudnya keterbukaan informasi dengan  |



		meningkatkan system, metode dan mutu penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat
Startegi	:	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan membuat strategi strategi pelayanan informasi publik
Kebijakan	:	1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi pada sistem teknologi informasi. 2. Mensosialisasikan Kepada masyarakat tentang akses terkait informasi publikMemperkuat sistem perlindungan masyarakat.
Misi 3		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperative governance Menata sisitem pelayanan public yang lebih baik dan professional
Tujuan 3		Tersedianya informasi public melalui media website;
Sasaran Strategi Kebijakan Misi 3		Informasi yang dapat di akses masyarakat Meningkatkan kualitas SDM Peningkatan kualitas informasi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperative governance Menata sisitem pelayanan public yang lebih baik dan professional
Tujuan 4		Tersedianya statistik disetiap OPD dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan untuk bahan evaluasi pembangunan daerah.
Sasaran Strategi Kebijakan		Satu data Pemerintah Kota Pematangsiantar Meningkatkan Kualitas SDM Penguatan kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dibidang Statistik
Misi 3		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan cooperative governance Menata sisitem pelayanan public yang lebih baik dan professional
Tujuan 5		Adanya keamanan informasi daerah
Sasaran Strategi Kebijakan		Meningkatnya informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Meningkatkan kualitas SDM Peningkatan kualitas informasi



### 3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar memiliki 3 Urusan antara lain Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Bidang Statistik, dan Urusan Bidang Persandian

Dimana Yang Pengampu salah satu prioritas Pembangunan Daerah Kota pematangsiantar adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar yaitu **Program Aplikasi Informatika** sebagai hasil rumusan pencapaian Visi dan Misi dengan **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan** dimana untuk mencapai Misi 3 yaitu : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang efektif , efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan good governance dan cooperative governance

Dimana Tujuan 3.1 adalah : Mewujudkan reformasi tata kelola Pemerintahan dan yang menjadi Sasaran 3.1.1. adalah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks SPBE yang mana untuk mencapai misi tersebut dirumuskanlah suatu permasalahan yaitu

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggaraan pemerintah belum Optimal	Pemerintahan Yang berbasis elektronik belum berjalan sepenuhnya Pelayanan Pengaduan smart city belum optimal

Yang menjadi Indikator Kinerja Sasaran Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar adalah *Indeks SPBE*

dan yang menjadi Indikator Kinerja Daerah untuk urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik adalah sebagai berikut :

- ✓ Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo.
- ✓ Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Pada Portal Pemerintah Kota Pematang Siantar.
- ✓ Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota.

- ✓ Peraturan daerah atau Peraturan kepala daerah terkait implementasi E-Government.
- ✓ Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi dan kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo
- ✓ Informasi tentang Sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
- ✓ Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah
- ✓ Sistem Informasi manajemen Pemerintah Kota
- ✓ Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah.
- ✓ Persentase OPD Yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
- ✓ Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Yang mana Indikator Kinerja Daerah tersebut merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pematangsiantar. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematagsiantar merencanakan Rencana Kerja untuk tahun 2024 antara lain :

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumen dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten Kota**

Kegiatan :

- Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

- Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan gaji dan Tunjangan
- Penyediaan Administrtasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan semesteran SKPD

Kegiatan:

- Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

Sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kegiatan :

- Administrasi Umum Perangkat daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistic kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Fasilitasi kunjungan tamu.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip dinamis SKPD

Kegiatan :



- Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

- Pengadaan Kenderaan dinas perorangan Dinas Atau Kenderaan Dinas Jabatan
- Pengadaan kenderaan dinas atau lapangan
- Pengadaan mebel
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Pengadaaan asset tetap lainnya
- Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Kegiatan :

- Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah

Sub Kegiatan

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jas komunikasi sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor

Kegiatan :

- Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kenderaan dinas perorangan dinas atau kenderaan dinas.
- Penyediaan jasa pemeliharaaa
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan :

- Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kenderaan dinas
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan asset tetap lainnya

## II. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten Kota

Sub kegiatan :

- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik

III. Program Penyelenggaraan Statistik sektoral

Kegiatan :

- Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan :

- Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan analisa dan desiminasi data statistik sektoral.

IV. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan :

- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan pusat data pemerintah daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik
- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan system SPBE
- Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem keamanan Informasi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik.

V. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pentapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jarring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian AKIP Perangkat daerah	Kominfo	8	Rp.4.690.575.576	DAU		8	Rp.6.193.700.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat		80				80	
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kominfo	1 Dok	Rp.9.836.959	DAU		1 Dok	Rp.20.700.000
	Pengurusan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Kominfo	2 Dok	Rp.4.836.957	DAU		2 Dok	Rp.5.200.000
	Koordinasi dan Pengurusan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi pengurusan Dokumen DPA-SKPD	Kominfo	1Dok	Rp.5.000.000-	DAU		1 Dok	Rp.5.500.000
	Koordinasi dan pengurusan Laporan capaian kinerja dan lhtislar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan lhtislar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi pengurusan laporan capaian kinerja SKPD	Kominfo	1 lap	Rp.1	DAU		1 lap	Rp.5.000.000
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kominfo	8 lap	Rp.1	DAU		8 lap	Rp.5.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Kominfo		Rp.2.805.000.003	DAU			Rp.3.026.500.000
	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Kominfo	14 bulan	Rp.2.800.000.000	DAU		14 Bulan	Rp.3.000.000.000
	Pengadaan Administrasi dan pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil pengadaanadministrasi pelaksanaan tugas ASN	Kominfo	1 Dok	Rp.1	DAU		1 Dok	Rp.5.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuanganSKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Kominfo	1 Dok	Rp.1	DAU		1 Dok	Rp.11.000.000
	Koordinasi dan pengurusan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi pengurusan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kominfo	1 lap	Rp.5.000.000	DAU		1 lap	Rp.5.500.000
	Koordinasi dan Pengurusan laporan Keuangan bulanan/ triwulan/semester SKPD	Jumlah laporan bulanan/ triwulan/semester SKPD	Kominfo	1 lap	Rp.1	DAU		1 lap	Rp.5.000.000
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Kominfo		Rp.4	DAU			Rp.65.000.000
	Pengadaan pakian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kominfo	1 paket	Rp.1	DAU		1 paket	Rp.20.000.000
	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kominfo	1 dok	Rp.1	DAU		1 dok	Rp.20.000.000
	Sosialisasi dan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	Kominfo	35 org	Rp.1	DAU		35 org	Rp.10.000.000
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Kominfo	25 Org	Rp.1	DAU		25 org	Rp.15.000.000
	Administrasi Umum Perangkat daerah		Kominfo		Rp.890.793.001	DAU			Rp.1.111.000.000
	Pengadaan Komponen	Jumlah paketkomponen	Kominfo	4 Paket	Rp.36.000.000	DAU		4 paket	Rp.41.000.000



	Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kominfo	4 paket	Rp.105.000.000.	DAU	4 Paket	Rp.150.000.000.
	Penyediaan peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kominfo	4 Paket	Rp.25.000.000.	DAU	4 paket	Rp.30.000.000.
	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kominfo	4 paket	Rp.77.700.000.	DAU	4 paket	Rp.100.000.000.
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kominfo	4 paket	Rp.70.000.000	DAU	4 paket	Rp.100.000.000.
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kominfo	1 dok	Rp.105.000.000	DAU	1 Dok	Rp.150.000.000.
	fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kominfo	1 lap	Rp.1.	DAU	1 lap	Rp.10.000.000.
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SRPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SRPD	Kominfo	50 lap	Rp.446.839.000.-	DAU	50 Lap	Rp.500.000.000.
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SRPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SRPD	Kominfo	12 Dok	Rp.25.200.000.	DAU	12 Dok	Rp.30.000.000.
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Kominfo		Rp.250.000.005	DAU		Rp.730.000.000.
	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kominfo	1 unit	Rp.1	DAU	1 Unit	Rp.200.000.000.
	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kominfo	1 unit	Rp.1	DAU	1 Unit	Rp.20.000.000.
	Pengadaan meubel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kominfo	1 unit	Rp.1	DAU	1 Unit	Rp.100.000.000.
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kominfo	10 Unit	Rp.250.000.000	DAU	10 Unit	Rp.300.000.000.
	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Kominfo	10 Unit	Rp.1	DAU	10 Unit	Rp.100.000.000.
	Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan yang disediakan	Kominfo	10 Unit	Rp.1	DAU	10 Unit	Rp.10.000.000.
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		Kominfo		Rp.534.999.601.	DAU		Rp.680.000.000.
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kominfo	4 lap	Rp.4.999.600.	DAU	4 lap	Rp.5.500.000.
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kominfo	12 Lap	Rp.130.000.000	DAU	12 Lap	Rp.150.000.000.
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Kominfo	4 Lap	Rp.1	DAU	4 Lap	Rp.25.000.000.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kominfo	4 lap	Rp.400.000.000	DAU	4 lap	Rp.500.000.000.
	Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah		Kominfo		Rp.200.000.003	DAU		Rp.560.000.000.
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Kominfo	2 Unit	Rp.1.	DAU	2 Unit	Rp.50.000.000.
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Kominfo	11 Unit	Rp.100.000.000.	DAU	11 Unit	Rp.150.000.000.
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	Kominfo	50 Unit	Rp.50.000.000.	DAU	50 Unit	Rp.55.000.000.
	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap yang dipelihara	Kominfo	1 Unit	Rp.1.	DAU	1 Unit	Rp.150.000.000.
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kominfo	1 Unit	Rp.1.	DAU	1 Unit	Rp.100.000.000.
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kominfo	2 Unit	Rp.50.000.000	DAU	2 Unit	Rp.55.000.000.
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks SPBE	Kominfo	2,9		DAU		
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik		Informatif				
		Persentase Penanganan Aduan SPAN Laporan		90 %				

	Program pengelolaan informasi dan komunikasi Publik		Kominfo		Rp. 3.670.000.000	DAU		Rp. 3.632.000.000
	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah daerah Kota	Jumlah informasi publik	Kominfo		Rp. 3.670.000.000	DAU		Rp. 3.632.000.000
	Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	Kominfo	1 Dok	Rp. 1.	DAU	1 Dok	Rp. 107.000.000
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Kominfo	1 Dok	Rp. 420.000.000	DAU	1 Dok	Rp. 450.000.000
	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan media komunikasi publik	Kominfo	1 Dok	Rp. 2.000.000.000	DAU	1 Dok	Rp. 2.500.000.000
	Pelayanan informasi publik	Jumlah dokumen pelayanan informasi publik	Kominfo	1 Dok	Rp. 650.000.000	DAU	1 Dok	Rp. 750.000.000
	Layanan hubungan media	Jumlah layanan hubungan media	Kominfo	1 Lay	Rp. 1.	DAU	1 Lay	Rp. 5.000.000
	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan	Kominfo	1 Dok	Rp. 1.	DAU	1 Dok	0
	Manajemen komunikasi krisis	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan manajemen Komunikasi krisis	Kominfo	1 Dok	Rp. 1.	DAU	1 Dok	Rp. 5.000.000
	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendistribusikan informasi program dan kebijakan	Kominfo	1 Dok	Rp. 1.	DAU	1 Dok	Rp. 5.000.000
	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota		Kominfo	1 unit	Rp. 1.	DAU	1 Unit	Rp. 10.000.000
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Kominfo		Rp. 2.575.000.000	DAU		Rp. 4.704.000.000
	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di tingkat pemerintah kabupaten/kota	Jumlah domain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat	Kominfo	1 Domain	Rp. 2.	DAU	1 Domain	Rp. 44.000.000
	Pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota	Jumlah pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota	Kominfo	1 Domain	Rp. 1.	DAU	1 Domain	Rp. 22.000.000
	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Kominfo	1 Dok	Rp. 1.	DAU	1 Dok	Rp. 22.000.000
	Pengelolaan E-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas komunikasi dan informatika	Kominfo		Rp. 2.575.000.000	DAU		Rp. 4.660.000.000
	Pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	Kominfo	1 Unit	Rp. 2.000.000.000	DAU	1 Unit	Rp. 2.500.000.000
	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Kominfo	1 Dok	Rp. 1.	DAU	1 Dok	Rp. 1.000.000.000
	Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Kominfo	1 Dok	Rp. 200.000.000	DAU	1 Dok	Rp. 300.000.000
	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Kominfo	7 OPD	Rp. 1.	DAU	7 OPD	Rp. 60.000.000
	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik		Kominfo	1 Unit	Rp. 288.000.000	DAU	1 Unit	Rp. 300.000.000
	Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah		Kominfo	2 layanan	Rp. 1.	DAU	2 layanan	Rp. 100.000.000
	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Kominfo	1 Dok	Rp. 1.	DAU	1 Dok	Rp. 100.000.000
	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah		Kominfo	1 Dok	Rp. 1	DAU	1 Dok	Rp. 100.000.000
	Pengelolaan Government chief information officer (GCIO)	Jumlah dokumen pengelolaan e-government chief information officer	Kominfo	1 Dok	Rp. 1.	DAU	1 Dok	Rp. 100.000.000



		(GCI)							
	Monitoring Evaluasi pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	Kominfo	1 Dok	Rp. 87.000.000,	DAU		1 Dok	Rp. 100.000.000,
	URUSAN STATISTIK	Indeks Pembangunan Statistik	Kominfo	3		DAU		4	
	Program penyelenggaraan Statistik Sektoral		Kominfo	18 Metadata	Rp. 100.000.000,	DAU			Rp. 163.015.000,
	Penyelenggaraan Statistik sektoral di tingkat daerah kabupaten/kota		Kominfo		Rp. 100.000.000,	DAU			Rp. 163.015.000,
	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan disseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan disseminasi data statistik sektoral	Kominfo	1 Dok	Rp. 100.000.000,	DAU		1 Dok	Rp. 120.000.000,
	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang diinput	Kominfo	1 Dok	Rp. 1,	DAU		1 Dok	Rp. 13.015.000,
	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	Kominfo	33 Orang	Rp. 1,	DAU		33 Orang	Rp. 20.000.000,
	Penyelenggaraan arsipasi statistik sektoral di daerah	Jumlah data statistik sektoral yang diinput	Kominfo	1 Dok	Rp. 1,	DAU		1 Dok	Rp. 10.000.000,
	URUSAN PERSANDIAN	Indeks Kesiapan	Kominfo			DAU			
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi		Kominfo		Rp. 141.568.701,	DAU			Rp. 505.000.000,
	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota		Kominfo	1 Dok	Rp. 141.568.701,	DAU		1 Dok	Rp. 505.000.000,
	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	Kominfo	1 lap	Rp. 41.568.700,	DAU		1 Lap	Rp. 100.000.000,
	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Kominfo		Rp. 50.000.000,	DAU			Rp. 100.000.000,
	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Kominfo		Rp. 50.000.000,	DAU			Rp. 300.000.000,
	Pengadaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Kominfo		Rp. 1,	DAU			Rp. 5.000.000,



**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF(Rp)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
<b>A.</b>	<b>Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.4.836.957
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.5.000.000.-
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Rp.5.000,000.-
4.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp.1
<b>B.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.2.805.000.003.-</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.2.800.000.000
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.2.800.000.000
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.1.-
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.5.000.000.-
5.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Rp.1.-
<b>C.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.4.-</b>
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.1.-
2.	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Rp.1.-
3.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Rp.1.-
4.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp.1.-
<b>D.</b>	<b>Adminitrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.890.739.001.-</b>
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.36.000.000.-
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.105.000.000
3.	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Rp.25.000.000.-
4.	Penyediaan Bahan logistic kantor	Rp.77.700.000.-
5.	Penyediaan barang cetakan dan	Rp.70.000.000.-

	penggandaan	
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.105.000.000.-
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.1.-
8.	Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp.446.839.000.-
9.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp.25.200.000.-
<b>E.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp.250.000.005.-</b>
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas atau kendaraan jabatan	Rp.1.-
2.	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp.1.-
3.	Pengadaan mebel	Rp.1.-
4.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.250.000.000.-
5.	Pengadaan Aset tetap lainnya	Rp.1.-
6.	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp.1.-
<b>F.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Rp.534.999.601.-</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.4.999.600.-
2.	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Rp.130.000.000.-
3.	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Rp.400.000.000.-
<b>G.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.200.000.003.-</b>
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp.1.-
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp.100.000.000.-
3.	Pemeliharaan dan peralatan dan mesin lainnya	Rp.50.000.000.-
4.	Pemeliharaan asset tetap lainnya	Rp.1.-
5.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp.1.-
6.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp.50.000.000.-
<b>II.</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Rp.3.070.000.006</b>
<b>A.</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kota</b>	<b>Rp.3.070.000.006.-</b>
1.	Monitoring opini dan inspirasi publik	Rp.1.-



2.	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Rp.420.000.000.-
3.	Pengelolaan Media komunikasi Publik	Rp.2.000.000.000.-
4.	Pelayanan Informasi Publik	Rp.650.000.000.-
5.	Layanan Hub Media	Rp.1.-
6.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp.1.-
7.	Manajemen komunikasi krisis	Rp.1.-
8.	Penyelenggara hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Rp.1.-
9.	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana Pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Rp.1.-
III.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.2.575.000.008.-
<b>A.</b>	<b>Pengelolaan Nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah kabupaten/Kota</b>	<b>Rp.2.-</b>
1.	Pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten Kota	Rp.1.-
2.	Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp.1.-
<b>B.</b>	<b>Pengelolaan E-Governmnet di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Rp.2.575.000.006.-</b>
1.	Pengelolaan Pusat data Pemerintah daerah	Rp.2.000.000.000.-
2.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi intra Pemerintah Daerah	Rp.1.-
3.	Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Rp.200.000.000.-
4.	Koordinasi dan sinkronisasi Data dan informasi elektronik	Rp.1.-
5.	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	Rp.288.000.000.-
6.	Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	Rp.1.-
7.	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas dan kota cerdas	Rp.1.-
8.	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Rp.1.-
9.	Pengelolaan government chief information officer (GCIO)	Rp.1.-



10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Rp.87.000.000.-
IV.	Program Penyelenggaraan statistik sektoral	Rp.100.000.003-
A.	Penyelenggaraan Statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten/kota	Rp.100.000.003
1.	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	100.000.000
2.	Membangun metadata statistik sektoral	Rp.1.-
3.	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Rp.1.-
4.	Penyelenggaraan otorisasi Statitik sektoral di daerah	Rp.1.-
V.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp.141.568.701.-
A.	Penyelenggaraan Persandian Untuk pengamanan Informasi Pemerintah daerah/Kabupaten/Kota	Rp.141.568.701.-
1.	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp.41.568.700,-
2.	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp.50.000.000.-
3.	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Rp.50.000.000.-
4.	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun 2024 ini memuat program dan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pematangsiantar menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan tahun 2024 .Rancangan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan kepada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar adalah program tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota pematangsiantar, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pematangsiantar yang Mantap, Maju dan Jaya.

Pematangsiantar,

  
**Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**JOHANNES SHOMBING, S.STP, M.SI**  
**NIP.198103251999121001**